# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini, negara-negara di dunia berkiompetisi dalam persaingan global. Hal ini menjadikan negara-negara di dunia saling membutuhkan satu sama lain dalam hal kerja sama untuk kepentingan negaranya masing-masing. Indonesia dan malaysia merupakan negara serumpun yang memiliki faktor historis yang sangat panjang. Persamaan latar belakang sejarah, budaya dan sosial masyarakat memberi banyak keuntungan pada hubungan bilateral kedua negari ini. Hubungan bilateral yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan antar kedua negara ini seringkali dilandasi oleh persamaan-persamaan tersebut. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah dalam hubungan baik kedua negara, semangat serumpun menjadi motivasi untuk memilih jalan damai dalam menyelesaikannya.

Masalah tenaga kerja migran merupakan masalah umum dan mendasar yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia antara lain berkaitan dengan masalah pengangguran, tingkat upah, produktivitas, hak, dan kewajiban tenaga kerja terutama sekali. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah ketenagakerjaan, menyebabkan tingkat kesejahteraan menjadi sangat minim.[[1]](#footnote-1)

Jumlah tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang dikaitkan dengan peningkatan ekonomi untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan.[[2]](#footnote-2) Dari tahun ke tahun, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo atau minat tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri disatu sisi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh para TKI baik selama proses keberangkatan, penempatan dan selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah suatu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan memanfaatkan pasar tenaga kerja internasional. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sebelum peberangkatan selama bekerja di luar negeri dan sampai tiba kembali di Indonesia. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilaksanakan secara terpadu antara instansi terkait di pusat dan daerah dengan mengikutsertakan peran perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat membantu memecahkan permasalahan negara lain yang berkekurangan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dengan menjalankan roda pembangunan. Bagi negara asal pekerja, pengiriman ini dapat mengurangi beban masalah sosial mengenai pengangguran dan kemiskinan. Bagi negara-negara pengirim seperti Indonesia, Filipina, Sri Langka, India, Bangladesh, Pakistan, Vietanm, Dan Thailand, ekspor tenaga kerja telah menjadi strategi yang semakin penting untuk mengatasi pengangguran, menghasilkan devisa negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara tersebut mengandalkan tenaga kerja migran untuk mengisi kekurangan tenaga kerja yang muncul ketika angkatan kerja dalam negeri tidak dapat memenuhi permintaan tenaga kerja karena ekonomi mereka yang tumbuh pesat, atau ketika warga negara mereka tidak bersedia mengambil pekerjaan padat karya, upah rendahm dengan kondisi kerja yang buruk.

Migrasi tenaga kerja Indonesia masih menunjukkan bahwa tenaga kerja migran Indonesia masih mencirikan oleh tingkat pendidikan yang rendah yaitu rata-rata lulusan sekolah dasar, pengetahuan yang kurang, seperti tidak memiliki kemampuan teknik, dan keterampilan yang rendah bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lainnya, seperti: Thailand, Filipina, dan Korea Selatan.

Malaysia merupakan salah satu negara utama tujuan utama dari para tenaga kerja Indonesia. Letak geografis yang tidak terlalu jauh dengan Indonesia, bahasa, budaya, maupun agama yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia adalah faktor utama yang mendorong para TKI untuk bekerja di Malaysia. Selain itu, nilai mata uang ringgit lebih tinggi dibandingkan rupiah merupakan salah satu faktor tenaga kerja migran Indonesia. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa mengeruk untung di negeri jiran.

Di satu sisi, Malaysia telah menikmati kemakmuran berkat kestabilan politik dalam kehidupan berbangasa dan bernegara. Saat merdeka tahun 1957, perekonomian Malaysia hanya bergantung penuh pada produksi karet dan timah. Tranformasi ekonomi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an menjadikan Malaysia sebuah negara modern. Proses industri telah menjadikan Malaysia yang lengkap dengan infrastruktur yang modern dan efisien.[[4]](#footnote-4)

Pertumbuhan industri juga mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja dalam bidang manufaktur dan kontruksi yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri. Hingga awal tahun 1980-an, kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian dan tingginya permintaan atas pekerja rumah tangga di antara kelas menengah yang telah mengembang sehingga mempercepat gelombang masuknya buruh migran.

Malaysia memang memikat. Banyak tenaga kerja migran memilih masuk ke Malaysia melalui rute tidak resmi karena imigrasi melalui agen tenaga kerja resmi dapat berakibat penundaan keberangkatan yang lama dan memerlukan prosedur birokrasi yang berbelit-belit, sementara pengurusan tidak remi hanya memerlukan waktu beberapa hari. Namun demikian, terdapat resiko lebih besar untuk korupsi dan pelecehan dengan agen-agen tenaga kerja tanpa izin, serta kurangnya perlindungan jika pekerja menghadapi masalah dengan majikan mereka atau badan pemerintah yang berwenang.

Dibalik semua itu ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan terhadap para TKI. Hal ini terjadi karena kesempatan yang terbuka bagi TKI adalah pekerjaan dengan kualitas yang tergolong rendah sehingga sering menimbulkan masalah eksploitasi, penindasan, penipuan dan lain sebagainya. Selain itu banyak sekali TKI yang berangkat ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu, sehingga status mereka di negara tujuan menjadi ilegal. Dengan status ilegal ini maka menjadikan hak-hak mereka pekerja bahkan sebagai manusiapun dilanggar.

Peningkatan jumlah TKI ilegal disinyalir telah menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas. Karena itulah pemerintah Malaysia mengambil langkah untuk membersihkan negara tersebut dari pekerja ilegal dengan melakukan pemulangan masal ke tanah air. Pemulangan besar-besaran tki ilegal dipicu oleh dua hal yaitu:

1. Sebagian besar TKI ilegal yang masuk ke Malaysia timur tidak memiliki dokumen-dokumen resmi yang memadai sebagai seorang pencari kerja
2. Hal ini dipicu oleh kerusuhan yang terjadi di negara bagian sembilan pada 7 januari 2002 dimana 15 orang TKI ditangkap polisi karena penyelidikan menunjukkan bahwa urine mereka mengandung narkoba. Rekan-rekan mereka (15 orang) merasa tidak puas atas penanganan dan melakukan keonaran di hoalan cooperation. Tiga hari kemudian kejadian serupa terulang lagi di sektor konstruksi di kawasan cyberjaya. Insiden ini membawa TKI mendekam di penjara Malaysia timur. [[5]](#footnote-5)

Peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk kerusuhan yang melibatkan pekerja asing. Hal inilah yang mendorong pemerintah Malaysia untuk mengeluarkan akta imigrasi 1154 tahun 2002 bagi para pekerja ilegal yang berlaku sejak 1 agustus 2002. Akta ini merupakan amandemen dari undang-undang ini berisi ketentuan tentang hukuman yang akan diberikan pada imigran ilegal yang tidak dapat memperlihatkan surat resmi seperti paspor, akan dikenai hukuman berupa denda, kurungan atau hukuman cambuk.[[6]](#footnote-6)

Sejak pemerintah Malaysia mengumumkan UU yang baru, seluruh perwakilan RI di Malaysia kebanjiran untuk mengurus surat perjanjian laksana paspor, dan bantuan pengurusan tiker serta transportasi. Sejak saat itu 75% TKI ilegal telah kembali ke Indonesia tanpa insiden yang berarti.[[7]](#footnote-7)

Bagi para TKI, mengurus surat perjalanan laksana paspor berarti bebas dari kerakutan ditangkap aparat polisi diraja malaysia maupun petugas imigrasi. Mereka bisa pulang ke Indonesia untuk mengurus dokumen resmi yang diperlukan. Setelah melengkapi surat-surat tersebut, mereka kemudian kembali ke Malaysia.

Meskipun telah dilakukan pemulangan terhadap TKI ilegal pada tahun 2002, masih saja terjadi arus balik (ke Malaysia) TKI ilegal. Mereka menganggap upah bekerja yang didapat di Malaysia jauh lebih besar bila dibandingkan upah di Indonesia. Bila mereka ingin bekerja sebgai TKI legal banyak syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi, dan banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Untuk itulah para pekerja menempuh jalan pintas menjadi TKI ilegal. Dengan demikian semakin banyak pula TKI ilegal yang kembali bekerja di Malaysia.

Akibat dari persoalan TKI ilegal yang terjadi di negara Malaysia, pada tahun 2004 kerajaan Malaysia mengeluarkan kebijakan amnesti bagi tenaga kerja ilegal yang bekerja di Malaysia dari manapun negara asalnya. AMNESTI, itulah yang kini ditempuh pemerintahan datuk seri Abdullah Ahmad Badawi untuk mendeportasi tenaga kerja ilegal yang ada di Malaysia. Terhitung tanggal 29 0ktober hingga 14 november 2004 silam, mereka diminta keluar tanpa ancaman dendan dan hukuman pidana. Sejak 29 oktober, sekitar 7000 warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia scara ilegal telah pulang ke Indonesia melalui pelabuhan malaka.[[8]](#footnote-8) Meskipun pemerintah Malaysia mengeluarkan program pengampunan dan memberikan amnesti terhadap TKI ilegal di Malaysia, masyarakat lain atau tenaga kerja yang mempunyai dokumen yang sah masih boleh bekerja di Malaysia. Adanya kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh malaysia membuat pemerintah Indonesia bergerak untuk melindungi warga negaranya yang terlibat masalah dengan pemerintah Malaysia dan melindungi warga negaranya selama proses penderpotasian dilakukan.

Dengan memperhatikan uraian pada fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan judul:

**PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENUNDAAN DEPORTASI TKI DI MALAYSIA (ANALISIS TERHADAP FENOMENA TKI ILEGAL DI MALAYSIA)**

## **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon Indonesia menghadapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Malaysia mengenai TKI ilegal?
2. Bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia khususnya dalam penundaan deportasi tenaga kerja Indonesia ilegal dari Malaysia?

## Pembatasan Masalah

 Melihat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan permasalahan ini hanya pada kebijakan Malaysia terhadap TKI ilegal. Adapun periode yang akan diteliti oleh penulis mengenai hal tersebut dibatasi dari kurun waktu tahun 2004-2005.

## Perumusan Masalah

 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas untuk mempermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut: **“Sejauh mana peran diplomasi Indonesia mampu menunda kebijakan deportasi yang dikeluarkan oleh Malaysia?”**

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### Tujuan Penelitian

 Tujuan berkaitan dengan penelaahan, pemahaman, serta pengembangan bidang yang sedang diteliti. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian dalam studi hubungan internasional ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sikap Indonesia menghadapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Malaysia mengenai TKI ilegal
2. Untuk mengetahui upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia khususnya dalam penundaan deportasi tenaga kerja migran Indonesia dari Malaysia.

### Kegunaan Penelitian

 Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung
2. Bagi institusi, Universitas Pasundan, karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan untuk memperkaya khasanah literatur studi Hubungan Internasional.
3. Sebagai referensi tambahan bagi pengembangan studi hubungan internasional secara khusus, yaitu sebagai landasan studi berikutnya mengenai peranan diplomasi pemerintah indonesia terhadap penundaan deportasi tenaga kerja indonesia di malaysia.
4. Bagi para pembaca, rangkaian pemikiran ini dapat dijadikan sumbangan untuk memperkaya khasanah literatur studi Hubungan Internasional.

## Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### Kerangka Teoritis

 Dalam melakukan pengamatan dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yangdianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis.Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

 Untuk menganalisa setiap permasalahan ataupun fenomena yang terjadi dan melibatkan aktor, aktifitas, dan perangkat dalam Hubungan Internasional, diperlukan pengertian akan Hubungan Internasional itu sendiri. Hubungan internasional merupakan disiplin ilmu yang mencakup suatu hubungan atau interaksi baik dalam hubungan antar negara dengan pemerintah maupun antar organisasi dan hubungan antar individu sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional. K.J Holsti memberikan definisi Hubungan internasional sebagai:

“hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transformasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”[[9]](#footnote-9)

Selain itu pengertian Hubungan Internasional dikemukankan juga dengan jelas oleh Norman D. Parmer dan Howard C.Perkins sebagai berikut, “Hubungan Internasional berkaitan dengan segala interaksi di antara negara-negarabaik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negaranya. Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar bangsa atau negarasaja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain. Interaksi yang terjadi antara negara-negara beserta dengan segala aspek-aspeknya merupakan sebuah hakekat dari Hubungan Internasional.”[[10]](#footnote-10) Dengan demikian Hubungan Internasional dapat diartikan sebagai sekumpulan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-state yang melewati suatu batas negara berdasarkan kepentingan bersama.

 Dalam bentuk klasik, Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara, namun dalam perkembangannya konsep ini mengalami pergeseran yang mencakup semua interaksi para aktor. Sedangkan dalam konsep kontemporer, hubungan internasional mengkaji berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tidak hanya diperankan oleh para state aktor, tetapi pengkajian Hubungan Internasional mencakup kegiatan-kegiatan yang diperankan oleh aktor individu atau mewakili oraganisasi-organisasi seperti organisasi internasional, yang perannya juga penting dalam politik internasional.[[11]](#footnote-11)

 Di dalam kerjasama internasional kedua negara yang bersangkutan dapat membatasi permasalahan yang sedang terjadi diantara mereka dan kerjasama tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengalokasian dari pada kebutuhan dan kekurangan antar negara-negara yang melakukan interaksi. Dalam hal ini seperti yang dikemukan oleh Koesnaedi Kartasasmita**,** kerjasama internasional adalah “Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum namun merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital baginegara,unsur tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, militer dan kesenjangan ekonomi.[[12]](#footnote-12)

 Terjadinya hubungan bilateral antara dua negara akan sangatmempengaruhidan mempercepat proses terjadinya kerjasama dalam memenuhi kebutuhan negaranya. Dengan adanya peranan pemerintah dan adanya hubungan antar negara maka akanterjalin kerjasama yang baik antar kedua negara. Salah satu bentuk kerjasamaadalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan suatu interaksi antar dua bangsa atau lebih yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada lingkungan internasional berdasarkan kepentingan berbagai bangsa. Dengan meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang menandakan meningkatnya sistem hubungan internasional yang dinilai sebagai fenomenayang wajar karena semakin disadari banyaknya masalah-masalah yang harus ditanggulangi dalam masyarakat internasional. Kerjasama ini pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berlangsung di berbagai bidang.

Konsep kerjasama internasional yang dikemukan KJ.Holsti adalah :

“Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubugandengan mengajukan alternative pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalahyang di hadapi, mengemukakan berbagai buktiteknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan bentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.”[[13]](#footnote-13)

 Dalam menjalankan peranan serta untuk mencapai tujuan nasional yang di gariskan dalam kostitusi suatu negara, maka tidak lepas dari apa yang dinamakan kepentingan nasional. Dapat dimengerti bahwa segala tindakan dari suatu negara akan tercermin dalam Politik Luar Negeri suatu negara yang mengandung kepentingan nasional masing-masing aktor interaksinya satu sama lain. Karena itudalam usaha menganalisa dan memahami lebih lanjut, perlu dipahami pula konsep kepentingan nasional.

 Kepentingan nasional sendiri menurut J.Frankle diartikan sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakan oleh suatu negara. J.Frankle juga mengemukakan bahwa:

“Kepentingan nasional dapat dipakai secara operasionalyang terlihatdari aplikasinya dalam kebijakan-kebijakan negara. Degan kata lain kebijakan-kebijakan yang dibuatoleh pembuat keputusandalam suatu negara akan selalu beorientasi pada kepentingan nasional”[[14]](#footnote-14)

 Interaksi dalam Hubungan Internasional adalah suatu cara untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan-kepentingan nasionalnya. Interaksi ini mengarah pada dua hasil umum, yaitu konflik atau kerjasama, tergantung kepentingan masing-masing negara. Jika kepentingan bersinggungan maka akan menghasilkan konflik. Sebaliknya, Kerjasama dapat tercipta jika negara-negara memiliki kesamaan kepentingan nasional dan guna mewujudkan kepentingan nasionalnya maka sebuah negara akan melakukan kerjasama dengan negara lain.

Kerjasama merupakan hal utama dalam upaya pencapaian kepentingan-kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan yang dikemukan oleh Charles H. Cooley dalam buku Soerjono Soekanto:

“Kerjasama timbul apabila orang menyadaribahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri melalui kerjasama, kesadaraan kerjasama dan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya suatu organisasimerupakan fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna”[[15]](#footnote-15)

 Kerjasama yang dilakukan antar negara dan telah melewati suatu batas negara maka disebut dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor negara untuk satu tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan mendapat keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

 Dalam melakukan kerjasama pengiriman tenaga kerja ke luar negeri oleh pemerintah indonesia, terdapat banyak agen penyalur ketenagakerjaan khususnya yang menyalurkan ke Malaysia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

 Tanggung jawab dan kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya yang berada diluar negeri diemban oleh fungsi konsuler suatu negara. Fungsi konsuler diatur dalam pasal 5 konvensi wina 1963 yaitu:

“Consular functioning consit in protecting in the receiving state the interests of sendingstate and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within thelimits permitted by international law.”[[16]](#footnote-16)

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya perwakilan konsuler negara pengirim dannegara penerima berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan kepentingan mereka. Apabila seorang warga negara dari suatu negara pengirim mengalami suatu masalah dinegara penerima, maka perwakilan konsuler negara pengirim dinegara penerima harus memberikan bantuan dan pertolongan . Maraknya peristiwa pelanggaran hukum yang menimpa warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang bekerja maupun menjalankan kegiatan lainnya menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan perlindungan kepada warganya yang berada diluar negeri yang bekerja sebagai tenaga kerja indonesia.[[17]](#footnote-17)

Kepentingan nasional sendiri menurut J.Frankle diartikan sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu negara. J.Frankle juga mengemukakan bahwa: ”kepentingan nasional dapat dipakai secara operasional yang terlihat dari aplikasinya dalam kebijakan-kebijakan negara. Dengan kata lain kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan dalam suatu negara akan selalu berorientasi pada kepentingan nasional.”[[18]](#footnote-18)

Dalam melakukan interaksi dengan aktor negara lain, suatu negara membutuhkan politik luar negeri. Politik luar negeri sering diartikan sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain. Politik luar negeri ditujukan pada peningkatan dan perlindungan kepentingan nasional. Secara umum, politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.[[19]](#footnote-19)

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.[[20]](#footnote-20)Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahkannya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.[[21]](#footnote-21) Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Setiap negara memiliki kepentingan dan tujuannya masing-masing. Untuk memenuhi kepentingan dan tujuannya inilah suatu negara menyusun politik luar negeri. Kualitas dan keberhasilan suatu politik luar negeri sangat tergantung pada pelaksanaan yang nyata di lapangan. Karena itulah pelaksanaan politik luar negeri oleh suatu negara membutuhkan instrumen-instrumen tertentu. Salah satu dari instrumen itu adalah diplomasi. Jack. C Plano dan Roy Oltonmenyatakan bahwa:

“Praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi, diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, serta pelaksanaannya. Dalam artian yang lebih sempit, lebih tradisional, diplomasi mencakup sarana dan mekanisme sementara politik luar negeri, menetapkan tujuan dan sasaran. Dalam artian yang lebih terbatas lagi, diplomasi mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan di luar batas wilayah juridiksi”[[22]](#footnote-22)

Politik luar negeri dan diplomasi memiliki hubungan yang erat. Politik luar negeri suatu negara sering dianggap sebagai substansi hubungan luar negeri diplomasi merupakan mekanisme pelaksanaan kebijakan luar negeri tersebut. Diplomasi berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan tujuan suatu negara dengan cara damai.

Sebenarnya kita sadari bersama bahwa dalam kondisi damai (tidak perang) diplomasi merupakan faktor penentu untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan pergaulan internasional. Berkaitan dengan diplomasi, The Oxford English Dictionary memberi konotasi sebagai berikut: “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang mana hubungan ini diselarasakan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat.”[[23]](#footnote-23)

Menurut the Chambers Twentieth Century Dictionary,”diplomaasi adalah the art of negotiation, especially of treaties between states political skill (seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara, keahlian politik)”[[24]](#footnote-24)

Ernest Satow mengatakan bahwa “diplomasi adalah the application of intelligent and tack to conduct of official relation between the goverment of independent states (penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara berdaulat).[[25]](#footnote-25)

Menurut Harold Nicholson, dalam bahasa terkini, kata diplomasi secara gegabah diambil untuk menunjukkan paling tidak ada lima hala yang berbeda, yaitu:”1). Politik luar negeri, 2). Negosiasi 3). Mekanisme dalam negosiasi tersebut, 4). Suatu cabang dinas luar negeri, 5). Suatu kualitas abstrak pemberian, yang dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional; dan dalam arti buruk mencakup tindakan taktik yang lebih licik.”[[26]](#footnote-26)

Dengan kata lain, diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila dengan cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.[[27]](#footnote-27)

Dalam pelaksanaan diplomasi, para diplomat memegang peranan penting dalam pelaksanaan misi politik luar negeri suatu negara. Istilah diplomat mencakup semua abdi negara di bidang hubungan diplomatik baik yang bertugas didalam negeri, di departemen luar negeri ataupun sebagai anggota kedutaan dan kantor perwakilan lainnya di luar negeri.[[28]](#footnote-28)

Diplomasi dapat dilakukan melalui track one diplomacy, track two diplomacy atau multytrack diplomacy. Penelitian ini akan membahas upaya diplomasi indonesia dalam track one diplomasi. Diplomasi tersebut lebih menekankan diplomasi antar pemerintah kedua negara (goverment to goverment). Dalam menjalankan prosesnya wakil pemerintah suatu negara dapat memilih berbagai pilihan diplomasi. Negosiasi langsung dilakukan oleh pemerintah negara yang sedang bermaslah merupakan salah satu pilihan dari diplomasi. Biasanya wakil pemerintah suatu negara yang melakukan negosiasi langsung adalah pihak yang mengerti duduk persoalan masalah yang sedang dihadapi negaranya.

Isu-isu dalam hubungan internasional tidak lagi terpaku pada masalah power. Migrasi internasional kini juga menjadi salah satu isu penting dalam studi ilmu hubungan internasional. Sejak semakin meningkatnya interaksi antara aktor-aktor hubungan internasional, batas-batas geografis antar negara pun semakin tidak jelas. Perpindahan penduduk (migrasi) antar negara semakin mudah. Secara umum permasalahan migrasi internasional bertumpu pada hal tentang adanya imigrasi secara legal dan imigrasi secara ilegal.

Undocumented worker merupakan kelompok imigran yang bekerja secara ilegal di negara yang dituju. Biasanya para imigran ini sudah kadaluarsa izin tinggalnya, menggunakan visa wisata atau turis, dan masuk melalui proses penyelundupan (people smuggling).[[29]](#footnote-29)

Didalam kehidupan bermasyarakat, kerjasama dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dialami oleh Indonesia. Dalam kehidupan Indonesia dan Malaysia banyak terdapat agen penyalur ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja Indonesia. Dalam kehidupan Indonesia dan Malaysia banyak terdapat agen penyalur ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di malaysia.

Di dalam suatu pedoman rekrut CTKI tahun 2005 menjelaskan mengenai tenaga kerja adalah sebagai berikut:

“tenaga kerja yaitu tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan pengertian tenaga kerja Indonesia yaitu warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI ke luar negeri”.[[30]](#footnote-30)

Sedangkan TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur dan aturan yang berlaku. TKI ilegal terjadi karena:

1. TKI berangkat bekerja ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen.
2. TKI berangkat bekerja ke luar negeri dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan (tidak untuk bekerja)
3. TKI berangkat bekerja ke luar negeri dengan dokumen lengkap namun setelah masa berlakunya paspor dan visa kerja habis, tidak diperpanjang lagi.
4. TKI berangkat bekerja ke luar negeri berpindah kepada pengguna jasa lain, sehingga dokumen yang ada tidak sesuai lagi[[31]](#footnote-31)

Politik luar negeri suatu negara berbeda satu sama lain sehingga memerlukan suatu strategi yang berbeda dalam menghadapi negara satu dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dibidang ketenagakerjaan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan tersebut akan lebih sempurna apabila kerjasama tersebut terdapat perjanjian yang saling mengikat kedua negara dana memberikan jaminan keselamatan kedua negara terutama pihak yang terlibat langsung dalam kerjasama kedua negara yaitu antara Indonesia dan Malaysia.

Tercipatanya suatu kesepakatan bersama atau MoU mengenai ketenagakerjaan sangat mempengaruhi TKI ilegal yang berada di luar negeri dalam masalah perlindungan dan penempatan sehingga dalam menjalankan perjanjian antara kedua negara harus dijalankan dengan serius dan sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan bersama atau MoU kedua negara mengenai ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Berkaitan dengan uraian diatas dapat ditarik beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

1. Masalah tenaga kerja indonesia di malaysia terjadi akibat masuknya tenaga kerja ilegal Indonesia ke Malaysia yang tidak taat terhadap hukum di Malaysia. Sehingga menjadikan mereka terusir atau dideportasi oleh pemerintah malaysia karena mereka tidak memiliki dokumen yang resmi.
2. Kondisi TKI ilegal pasca pemberlakuan akta imigrasi 1154 tahun 2002 yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia merupakan alasan bagi Indonesia untuk melakukan upaya-upaya diplomasi terhadap pemerintah Malaysia.
3. Diperlukan suatu kemampuan kerja dari pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang ada di malaysia khususnya TKI ilegal.
4. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah TKI ilegal adalah dengan membuat nota kesepahaman (MoU) mengenai ketenagakerjaan Indonesia di Malaysia.

### Hipotesis

Bertolak dari permaslahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**“Karena upaya diplomasi Indonesia terhadap kebijakan Malaysia mendeportasi TKI dilakukan secara intensif melalui diplomasi puncak dan diplomasi tingkat menteri serta diplomasi tingkat pejabat senior maka Malaysia memberikan tenggang waktu dan kemudahan untuk mengurus surat izin sebagai TKI ilegal.**

**SKEMA TEORITIK**

**SIKAP PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN MALAYSIA MENGENAI TKI ILEGAL: SUATU TINJUANAN ANALISIS TERKAIT PERAN DIPLOMASI DENGAN PENUNDAAN DEPORTASI (2002-2005)**

Sikap Pemerintah Indonesia

Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Tentang Ketenagakerjaan

Kerjasama Dalam Bidang Ketenagakerjaan

Kebijakan Indonesia Mengenai TKI

Kebijakan Malaysia Mengenai Tenaga Kerja Asing

TKI Ilegal

MoU tentang ketenagakerjaan

Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri

Kebijakan Mengenai TKI Ilegal

TKI Ilegal

Adanya masalah mengenai TKI ilegal

Diplomasi Pemerintah Indonesia

1. Diplomasi Tingkat Puncak
2. Diplomasi Tingkat Menteri
3. Diplomasi Tingkat Pejabat Senior

Deportasi TKI Ilegal

Penundaan Deportasi

### Tingkat Analisis

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa korelasionis. Dalam unit eksplanasinya dan unit analisisnya ada pada tingkatan yang sama atau sejajar, yaitu negara-bangsa dengan negara-bangsa.

### Operasionalisasi variabel dan indikator

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan juga dalam hipotesis, maka untuk lebih jelasnya akan dikemukakan dalam tabel operasionasionalisasi variabel dan indikator, sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam hipotesis(teoritik) | Indikator(empirik) | Verifikasi(analisis) |
| **Variabel bebas:**“Karena upaya diplomasi pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Malaysia mendeportasi TKI dilakukan secara intensif melalui diplomasi tingkat menteri serta diplomasi tingkat pejabat senior”. | 1. Adanya intensitas kunjungan-kunjungan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menteri tenaga kerja dan transmigrasi ke Malaysia
2. Adanya penandatanganan MoU antara Malaysia dan Indonesia mengenai ketenagakerjaan
 | 1. Data (fakta dan angka) mengenai pertemuan antara presiden Susilo Bambang Yudhiyono dan perdana menteri Malaysia Abdulloh Ahmad Badawi baik itu pertemuan di Indonesia, maupun di Malaysia.
2. Data (fakta dan angka) mengenai adanya penandatangan MoU di sektor formal pada tahun 2004 dan di sektor formal pada tahun 2006.
 |
| **Variabel terikat:**“maka Malaysia memberikan tenggang waktu dan kemudahan untuk mengurus surat izin sebagai TKI legal” | 1. Adanya tenggang waktu penundaan deportasi
2. Adanya kemudahan dari pihak Malaysia bagi para TKI yang akan kembali bekerja di Malaysia.
 | 1. Data (fakta dan angka) mengenai adanya tenggang waktu penundaan deportasi mulai dari 29 oktober 2004 hingga 28 oktober 2005.
2. Data (fakta dan angka) mengenai adanya kemudahan pengurusan perizinan dari pihak Malaysia.
 |

## **Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data**

### Metode penelitian

1. Metode Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis yaitu suatu analisis yang bertujuan menggambarkan , menganalisa, dan mengklarifikasikan gejala-gejala yang berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang aktual. Kemudian yang menganalisa untuk menginterprestasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan diperkirakan di masa yang akan datan, serta menginterprestasikan suatu fenomenal aktual yang relevan.

1. Metode Historis Analisis

Metode hsitoris analisis, digunakan terutama untuk memahami latar belakang suatu masalah yang kemudian dijadikan sebagai bahan acuan untuk menganalisa masalah yang terjadi pada masa lampau dan masa sekarang ini yang berfungsi untuk memprediksikan masalah-masalah yang terjadi pada masa yang akan datang.

Maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulish berusaha mengaplikasikan metode diatas dalam permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai masalah peran diplomasi indonesia terhadap penundaan deportasi TKI ilegal di Malaysia.

### Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau kepustakaan. Penulis mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan penelitian ini dari berbagai referensi atau pustaka seperti buku, surat kabar, diktat, dokumen, dan laporan. Selain itu dalam memanfaatkan sumber informasi melalui teknologi informasi yang dirasakan terus berkembang saat ini, penulis juga memanfaatkan fasilitas internet untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## Lokasi dan Lamanya Penelitian

### Lokasi Penelitian

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan di Bandung
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan di Bandung
3. BP3TKI Bandung

### Lamanya Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

## **SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab:

BAB I

Berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Dan Lamanya Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II

Menguraikan tentang variabel bebas di dalam masalah penelitian mengenai sejarah pengiriman TKI ke luar negeri, kebijakan pemerintah Indonesia mengenai TKI, proses penempatan TKI ke luar negeri fenomena munculnya Tenaga Kerja Indonesia ilegal, program Pemerintah Indonesia mengenai TKI ilegal.

BAB III

Menguraikan mengenai variabel terikat dalam masalah penelitian mengenai kebijakan politik luar negeri Malaysia mengenai ketenagakerjaan, kebijakan Malaysia mengenai tenaga kerja asing, kebijakan mengenai TKI ilegal, program Malaysia mengenai Tenaga Kerja Indonesia ilegal.

BAB IV

Analisis mengenai peran diplomasi terhadap penundaan deportasi, upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi TKI ilegal, intensitas diplomasi pemerintah Indonesia, hasil-hasil diplomasi pemerintah indonesia, berupa penandatanganan MoU antara Indonesia-Malaysia, penundaan deportasi, kemudahan dari pihak Malaysia.

BAB V

Kesimpulan

# **BAB II**

# **DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN**

## **Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri dan perilaku suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh satu macam aktor saja, karena ini meliputi internal life dan external needs dari sekelompok masyarakat untuk mencapai dan memelihara identitas geografi, legal, dan sosialnya sebagai suatu negara bangsa.[[32]](#footnote-32)

Suatu fenomena yang menjelaskan tentang mengapa suatu negara melakukan tindakan tertentu dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan berbagai perubahan yang terjadi di dalam negeri. Lentner memberikan pengertian mengenai kebijakan luar negeri sebagai kebijakan yang ditujukan atau diarahkan kepada lingkungan dari suatu teritorial negara dan pemerintahan yang disebut pelaku atau aktor.[[33]](#footnote-33)

Holsti mendefenisikan kebijakan luar negeri sebagai suatu kajian yang menganalisis tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan.[[34]](#footnote-34) Sebagai suatu sistem, kebijakan luar negeri dapat dipandang sebagai seperangkat komponen yang dikategorikan dalam satuan input, proses, dan output . input berasal dari lingkungan eksternal dan internal, sedangkan output akan beryupa kebijakan luat negeri yang berhubungan dengan penentuan tujuan tersebut dan upaya-upaya dalam mencapai tujuan.[[35]](#footnote-35)

### Level analisis kebijakan luar negeri

Holsti memberikan level analisis dalam menelaah kebijakan luar negeri, yaitu tingkat analisis sistem, negara, dan yang terkecil individu. Pada tingkatan sistem yang menjadi hirauan adalah lingkungan eksternal. Hal ini disebabkan karena kebijakan luar negeri merupakan reaksi terhadap lingkungan eksternal. Pada level negara, yang menjadi titik berat adalah kondisi domestik masing-masing negara yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pada level ini kebijakan luar negeri ini dilihat sebagai hasil dari tekanan politik dalam negeri, ideologi nasional, nilai-nilai, dan kebutuhan sosial ekonomi rakyat dan elit. Level individu memusatkan perhatian pada tindak-tanduk dan perilaku pribadi para negarawan. Tingkat analisis ini mengfokuskan pada ideologi, cita-cita motivasi, persepsi, nilai-nilai atau keistimewaan mereka yang diberi wewenang untuk mengambil berbagai keputusan bagi negara[[36]](#footnote-36).

Sementara Mochtar Mas’oed menerapkan lima tingkat analisis yaitu individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara-negara dalam suatu region, dan sistem global. Pada tingkat individu yang dilihat adalah perilaku individu yang dianggap mempengaruhi fenomena hubungan internasional. Oleh karena itu yang harus ditlaah adalah sikap dan perlaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan seperti, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, penasehat keamanan dan sebagainya. Pada tingkat kelompok individu yang menjadi perhatian adalah perlaku kelompok-kelompok yang terlibat dalam hubungan internasional seperti kabinet, dewan penasehat kemanan, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintah dan sebagaianya. Pada tingkat negara bangsa yang menjadi hirauan adalah perilaku negara bangsa sebagai suatu unit yang utuh. Tingkat analisis ini berasumsi bahwa semua pembuat keputusan dimana saja akan berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama, oleh karena itu analisis yang menekankan perbedaan sekelompok individu di suatu negara dengan negara lain akan sia-sia. Pada tingkat analisis kelompok negara-negara dianggap bahwa seringkali negara bangsa tidak bertindak sendiri-sendiri tetapi sebagai suatu kelompok.[[37]](#footnote-37)

### Perangkat pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri adalah aksi-aksi atau ide-ide yang dibuat oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan beberapa perubahan di dalam lingkungan yaitu dalam kebijakan, sikap, tindakan, dan aksi negara. Kemudian ada pembagian gagasan mengenai kebijakan luar negeri menjadi empat komponen, yaitu:

1. Orientasi, yaitu prinsip-prinsip umum dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi dasar untuk mencapai tujuan-tujuan dalam negeri dan luar negeri dan juga untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan. Bentuk-bentuk orientasi tersebut adalah isolasi, non-blok dan pembentukan koalisi dan aliansi, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk orientasi adalah :
2. Struktur sistem internasional
3. Sifat, sikap, dan kebutuhan sosial-ekonomi domestiknya
4. Derajat pemahaman para pembuat kebijakan terhadap ancaman luar yang berkesinambungan sehubungan dengan nilai dan kepentingan mereka sendiri, dan
5. Letak geografis, karakteristik topografis dan sumbangan suatu negara dalam sumber alam.
6. Peran nasional menggambarkan secara garis besar fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan negara dalam konteks internasional. Peran nasional merupakan garis pedoman untuk bertindak bila timbul situasi khusus dalam lingkungan. Peran nasional juga mencerminkan tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai pemerintah secara regional atau internasional sebagai suatu keseluruhan.
7. Tujuan pada dasarnya merupakan suatu gambaran keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah, melalui pembuatan kebijakan luar negeri dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain. Tujuan mungkin khusus, menyangkut masalah tertentu atau masalah umum.
8. Tindakan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya. Suatu tindakan pada dasarnya adalah bentuk komunikasi yang merupakan kepentingan nasional dengan situasi internasional yang sedang berlangsung dengan power yang dimiliki untuk mencapainya.[[38]](#footnote-38)
9. Kepentingan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri

Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa atau negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, kemanan dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada kepentingan secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintah maka konsepsi ini dapat menjadi lebih akurat jika dianggap sebagai kepentingan nasional.[[39]](#footnote-39)

Eksistensi negara akan tetap berlangsung sekiranya tercapai kepentingan-kepentingan negara tersebut. Kepentingan-kepentingan ini jelas tidak dapat dipenuhi hanya satu lingkup domestik saja, namun juga harus melalui kerangka hubungan antar negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Konsep tersebut mencakup melestarikan kesatuan teritorialnya dalam menjaga independensi politik dan ekonominya dalam mencapai standar hidup yang lebih tinggi bagi populasinya. Menurut holsti, kepentingan nasional secara umum dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. Keputusan utama yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang harus disiapkan
2. Tujuan jangka menengah termasuk tuntutan beberapa negara
3. Tujuan jangka panjang yang kadang-kadang dibatasi oleh waktu.[[40]](#footnote-40)

## **Kerjasama Ketenagakerjaan Indonesia dan Malaysia**

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyadari bahwa masalah tenaga kerja menjadi prioritas dalam kebijakan masing-masing negara. Kondisi domestik Indonesia dan Malaysia menjadi stimulus bagi kedua negara dalam menjalin kerjasama guna memenuhi kepentingan nasional kedua negara terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja. Di Malaysia, kebijakan ekonomi baru *(new economic policy)* dalam penerapannya telah membawa kemajuan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi de negara ini. Namun dampak lain dari kebijakan yang berorientasi pada sektor industri ini adalah arus urbanisasi besa-besaran yang terjadi di Malaysia. Orang-orang desa berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota. Mereka lebih memilih tidak bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, akibatnya sektor-sektor tersebut kekurangan tenaga kerja. Malaysia membutuhkan asupan tenaga kerja yang mau ditempatkan di sektor tersebut. Tenaga kerja asing merupakan alternatif yang dipilih pemerintah Malaysia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negerinya.

Sedangkan di Indonesia, tingkat pengangguran yang tinggi karena kondisi perekonomian Indonesia menjadi faktor pendorong bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri khususnya di Malaysia. Pemerintah Indonesia pun memiliki kebijakan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri[[41]](#footnote-41). Pengiriman TKI merupakan salah satu prioritas kebijakan nasional yang harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan perekonomian negara yang masih tergolong berkembang dan pertumbuhan penduduk masih tinggi menyebabkan kelebihan tenaga kerja tidak diserap oleh kegiatan ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah ketenagakerjaan nasional.

Kepentingan Indonesia dan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mendorong kedua negara ini menjalin hubunga kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Di satu sisi, Indonesia, perlu mengatasi masalah pengangguran karena terbatasnya kesempatan kerja, di sisi lain Malaysia membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kebijakan industrialisasinya. Dalam kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan, kedua pemerintah negara ini berupaya untuk mengatur agar proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dapat berjalan baik sehingga masalah-masalah yang muncul dapat teratasi dengan baik.

Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan acuan bagi program-program pembinaan dan perlindungan terhadap TKI di Malaysia. Program ini dikenal dengan program goverment to goverment (G to G) yang pada dasarnya mengatur prosedur penempatan dan perlindungan TKI. Kesepakatan kedua pemerintah negara ini dituangkan dalam beberapa nota kesepahaman atau nota diplomatik (MoU).

### Persetujuan Jakarta 1993

Pada tanggal 17 juli 1993 di Malaysia, presiden Soeharto, perdana menteri Mahatir Mohammad sepakat untuk membentuk komite bersama sebagai upaya memperlancar dan memperbaiki prosedur pengiriman TKI. Persetujuan ini merupakan langkah-langkah lanjut dari pertemuan segitiga antara menteri-menteri (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) di Langkawi, Malaysia. Para wakil-wakil dari masing-masing negara berniat untuk meningkatkan dan mempererat hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan dalam penyediaan tenaga kerja.

Persetujuan Jakarta berisi ketentuan mengenai perlindungan dan pembinaan tenaga kerja yang diberikan oleh pejabat-pejabat diplomatik masing-masing negara dimana para TKI tersebut bekerja. Persetujuan ini ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman RI-Malaysia pada tanggal 15 oktober 1995 dan 30 januari 1996 di kualalumpur.[[42]](#footnote-42)

### Nota Kesepahaman 15 oktober 1995

Nota kesepahaman ini berisi prosedur pengambilan pekerja Indonesia untuk bekerja di Malaysia pada sektor formal. Dalam nota ini ditetapkan bahwa pengiriman TKI dilakukan melalui “satu pintu”. Pemerintah Malaysia membentuk pasukan petugas pekerja asing (PPPA) yang terdiri dari beberapa instansi dan menjadi badan resmi Malaysia untuk memproses rekrut dan penyaluran TKI ke Malaysia.[[43]](#footnote-43)

Nota kesepahaman kemudian disempurnakan kembali pada tahun 1998 dengan nota kesepahaman 1 agustus 1998. Hal ini dikarenakan kesepakan yang sudah disepakati tidak dapat berjalan dengan baik. PPPA yang dibentuk pemerintah Malaysia dibubarkan pada bulan februari 1997 dan fungsinya diambil alih oleh imigrasen Malaysia . PT bijak yang ditunjuk Indonesia gagal menjalankan fungsinya sebagai agen tunggal penyalur TKI.

### Nota Kesepahaman 30 Januari 1996

Nota kesepahaman ini berisi tentang garis panduan pengkajian terhadap TKI yang bekerja di sektor informal khsusnya pembantu rumah tangga. Nota ini disebut sebagai nota kesepahaman mengenai “garis panduan pengkajian pembantu rumah tangga Indonesia antara Malaysia dan Indonesia”. Secara garis besar, garis panduan dalam nota ini mengatur besarnya tarif bayaran yand dinekanakan oleh agensi Malaysia kepada majikan dan memastikan agar TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia tidak dieksploitasi.

Adapun kesepakatan yang disetujui dalam nota ini adalah pertama, besarnya tarif bayaran yang dikenakan oleh agensi Malaysia kepada majikan Malaysia ada sebesar RM 1870, pembiayaan ini meliputi biaya pengankutan TKI ke Malaysia, asuransi, jasa agensi, dan lain-lain. Sedangkan pembebanan biaya di Indonesia sebesar RM 1083 meliputi jasa penempatan, dokumen paspor, akomodasi dan pembiayaan lain-lain. Kedua, mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh majikan Malaysia jika memperkerjakan TKI sebagai pembantu rumah tangga. Persyaratan tersebut sebagai berikut:

1. Kontrak kerja harus ditandatangani oleh majikan dan pembantu rumah tangga sebelum penempatan
2. Kontrak tersebut harus berisi besarnya gaji yang ditentukan oleh pihak berkuasa di Indonesia dan disetujui oleh majikan di Malaysia.
3. Bidang tugas pembantu rumah tangga meliputi tugas-tugas urusan rumah tangga dan majikan tidak dibenarkan memperkerjakan untuk tujuan-tujuan lain.

Disamping itu penempatan pembantu rumah tangga juga mempertimbangkan prinsip, norma, agama, dan budaya setempat.

Nota kesepahaman ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi TKI. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus disempurnakan terutama hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penempatan TKI ke Malaysia. Penyempurnaan mekanisme penempatan TKI ini dimaksudkan agar pemerintah masing-masing negara dapat memantau agen Malaysia, majikan di Malaysia, dan PJTKI dalam menjalankan kewajiban mereka masing-masing.

### Nota Kesepahaman 1 Agustus 1998

Nota ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman 1995 yang mengatur prosedur penempatan TKI sektor formal ke Malaysia. Nota kesepahaman 1 agustus 1998 merupakan nota yang mengatur prosedur pengambilan pekerja dari Indonesia untuk bekerja di Malaysia pada sektor formal. Hal-hal yang diatur dalam nota ini adalah pertama, mengenai prosedur pengambilan TKI, majikan dari Malaysia dapat mengambil pekerja Indonesia dengan cara mendatangi langsung PJTKI atau melalui bantuan depnaker RI. Kedua, majikan Malaysia tidak dibenarkan menggunakan jasa agensi Malaysia. Penggunaan jasa agensi Malaysia. Penggunaan jasa agensi Malaysia hanya dibenarkan untuk memproses penempatan pembantu rumah tangga saja. Ketiga, majikan Malaysia tidak dikenakan biaya apapun tetapi tetap membayar harga tiket pengangkutan TKI dari daerah asalnya di Indonesia sampai ke Malaysia. Keempat, majikan wajib membayarkan terlebih dahulu levy (sejenis pajak pekerja asing) untuk satu tahun pertama. Biaya ini dikembalikan dengan potongan upah TKI selama satu tahun pertama. Kelima, persyaratan teknis seperti perumahan, kematian, kesehatan, kartu imigrasi pengganti paspor selama TKI berada di Malaysia, larangan untuk menikah dengan sesama pekerja asing atau penduduk setempat, dan batasan umur untuk menjadi TKI adalah 18 sampai 40 tahun.[[44]](#footnote-44)

Nota kesepahaman 1 agustus 1998 dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Namun tetap memerlukan penyempurnaan dari kedua negara. Hal ini dikarenakan masih ditemukan masalah-masalah teknis yang menghambat pelaksanaan nota ini. Nota kesepahaman ini masih perlu disempurnakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia agar kerjasama kedua negara dapat berjalan dengan baik.

## **Usaha-Usaha Diplomasi dalam Hubungan Ketenagakerjaan Indonesia dan Malaysia**

Sebagai elemen yang sangat penting dalam perlindungan masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia, nampaknya diperlukan banyak pembenahan dalam hubungan yang terjalin antara pemerintah kedua negara. Dua hal yang sangat menonjol adalah masalah regulasi dan komunikasi politik.

Dalam bidang regulasi, pemerintah Indonesia dan Malaysia hanya memiliki nota kesepakatan dan nota diplomatik mengenai masalah tenaga kerja formal dan informal. Pada bulan agustus tahun 2002, dalam Summit Meeting di Bali, Megawati dan Mahathir Muhammad gagal untuk mencapai kesepakatan yang dapat terima oleh kedua belah pihak dalam masalah tenaga kerja migran.

Memorandum of Understanding dan Exchange of Note tahun 1996 dan 1998 tersebut belum cukup untuk dijadikan dasar hukum bagi terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia. Kebutuhan utama akan regulasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia adalah suatu regulasi yang berlaku secara internasional, antara lain melalui retifikasi konvensi PBB tentang perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya (UN Convention on Protection on Migrant Workers and Their Families) tahun 1990, Convention on Elimination of Discrimination Against Women dan beberapa konvensi ILO yang berkaitan dengan masalah buruh migran. Pemerintah Indonesia berencana untuk meratifikasi konvensi tersebut pada awal masa persidangan DPR bulan september 2004, namun kendala terbesar adalah memberikan porsi kebebasan yang terlalu besar bagi para butuh migran (diantaranya kebebasan untuk membentuk serikat buruh migran). Apabila konvensi ini tidak diratifikasi oleh pemerintah kedua negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Malaysia, maka keberlakuannya menjadi sia-sia.

Dalam masalah komunikasi politik, terlihat beberapa kali pemerintah Indonesia dan Malaysia gagal untuk membuat suatu hubungan baik. Menjelang pemberlakuan Immigration Act 1154 tersebut sebenarnya Ahmad Badawi , yang saat itu masih menjabat sebagai deputi perdana menteri, telah mengumumkan pada bulan februari 2002 bahwa undang-undang tersebut akan mulai diberlakukan pada bulan agustus 2002. Jadi sebenarnya Indonesia memiliki waktu sekitar lima bulan untuk dapat melakukan usaha-usaha pemulangan warga negaranya yang bekerja di Malaysia secara tidak resmi. Namun waktu lima bulan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dan akhirnya terjadi pemulangan besar-besaran yang diikuti oleh tragedi kemanusiaan di Nunukan. Sulit untuk ditelusuri apakah pemerintah Malaysia yang kurang mengkampanyekan kebijakan baru tersebut ataukah memang pemerintah Indonesia yang lambat menanganinya.

Masih seputar immigration act 1154 tersebut, PM Mahathir Muhammad mengeluarkan suatu kebijakan “hire indonesian last”, yang bertujuan mengurangi jumlah tenaga kerja Indonesia sampai separuh dari jumlah yang ada dan membatasi mereka untuk bekerja di sektor konstruksi dan perkebunan. Kebijakan ini ternyata memancing protes dari kalangan bisnis di Malaysia yang masih membutuhkan kehadiran TKI untuk menunjang usaha konstruksi dan perkebunannya. Kebijakan ini juga tidak dikonsultasikan lebih jauh dengan pihak pemerintah Indonesia.

Komunikasi politik menjadi unsur yang sangat penting bagu hubungan antara Indonesia dan Malaysia, mengingat karakteristik hubungan dua negara yang cukup unik, yang oleh seorang penulis Malaysia, Firdaus Haji Abdullah sebagai love and hate affairs, karena pola hubungannya yang sangat erat dengan variasi kooperatif dan konfrontatif. [[45]](#footnote-45)

## **Perkembangan Hubungan Ketenagakerjaan antara Malaysia dan Indonesia**

Malaysia merupakan salah satu negara yang berhubungan dengan masalah migrasi, khususnya tenaga kerja. Awal masuknya tenaga kerja migran ke Malaysia tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya kebijakan ekonomi baru (New Economic Policy/NEP) pada periode tahun 1971-1990/kebijakan tersebut memicu ekspansi industri di Malaysia, terutama sektor manufaktur, yang kemudian diikuti oleh penambahan tenaga kerja di sektor perdagangan, jasa, dan birokrasi pemerintahan yang hampir seluruhnya terpusat di daerah perkotaan.

Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur tenaga kerja migran yang datang ke Malaysia, yang dapat dijelaskan dalam dua sebab.[[46]](#footnote-46) pertama, pesatnya pertumbuhan sektor manufaktur menyebabkan banyak penduduk muda Malaysia yang kemudian pindah ke kota untuk mengisi lapangan pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa. Hal tersebut juga dipicu oleh semakin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja Malaysia terutama sejak diterapkannya NEP pada awal tahun 1970-an. Semakin tingginya tingkat pendidikan, terutama di daerah pertanian menyebabkan meningkatkanya harapan untuk bekerja di sektor modern yang menjanjikan upah lebih tinggi. Akibatnya, terjadi kekurangan di sektor pertanian. Kekurangan tenaga kerja tersebut terutama sangat disarankan di daerah Trengganu, Pahang, Kelantan, Johor, Perak, dan Kedah. Pada tahun 1980-1985, Malaysia pernah mengalami kerugian di bidang perladangan karet dan kelapa sawit sebesar 370 juta ringgit Malaysia yang menyebabkan turunnya penerimaan devisa Malaysia.[[47]](#footnote-47) Masalah kekurangan tenaga kerja ini bila tidak segera diatasi akan membahayakan perekonomian Malaysia. Walaupun sektor manufaktur telah tumbuh pesat dan menghasilkan devisa yang besar karena sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam menghadapi devisa.

Kedua, NEP juga meningkatkan kesempatan bagi wanita Malaysia yang berpendidikan tinggi untuk bekerja di lapangan kerja formal. Tingginya kesempatan untuk berkarir ini pada akhirnya menyebabkan kebutuhan terhadap pembantu rumah tangga menjadi sangat besar. Sementara itu, wanita Malaysia yang kurang mendapat pendidikan formal lebih tertarik untuk mengisi pekerjaan di sektor manufaktur karena tingkat upah yang lebih tinggi. Akibatnya terjadi kekurangan tenaga kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.

Dua perkembangan ini kemudian membuat pemerintah Malaysia membuka kesempatan terhadap masuknya para pekerja asing. Dari beberapa negara menjadi pemasok kebutuhan tenaga kerja untuk Malaysia, Indonesia menempati posisi yang sangat signifikan dalam segi kualitas.

Sampai dekade 70-an, kehadiran TKI di Malaysia belum menjadi suatu masalah bagi masyarakat Malaysia. Kehadiran mereka bahkan tidak terlalu dirasakan oleh sebagian besar warga Malaysia karena jumlah mereka relatif kecil dan terkonsentrasi di pedesaan. Pada tahun 1979, wakil menteri perburuhan Malaysia mengumumkan bahwa pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia berjumlah 12 ribu orang.[[48]](#footnote-48) Secara keseluruhan, kehadiran TKI pada waktu itu belum menujukkan masalah berarti. Sektor moden di kota tumbuh pesat dan berhasil menyerap angkatan kerja Malaysia, baik yang datang dari perkotaan ataupun pedesaan. Sementara itu, TKI yang jumlahnya terus meningkat mendapat respon yang cukup baik karena kehadiran mereka memang benar-benar dibutuhkan, terutama oleh pihak perkebunan.

Situasi mulai berubah saat memasuki dekade 80-an, ketika arus migrasi dari Indonesia ke Malaysia meningkat secara tajam. Pada tahun 1981, pemerintah Malaysia memperkirakan jumlah pekerja Indonesia telah meningkat menjadi sekitar 100 ribu orang, menurut laporan masalah-masalah buruh dan tenaga kerja yang dikeluarkan kementrian Malaysia / kemetrian perburuhan, pada tahun 1984 terdapat kurang lebih 500 ribu pekerja asing di Malaysia, yang didominasi oleh TKI ilegal. Mereka tidak hanya bekerja di sektor perkebunan di daerah pedesaan, tetapi juga direkrut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja di sektor konstruksi yang kebanyakan berlokasi di perkotaan. Jumlah mereka meningkat secara drastis tersebut mulai menarik perhatian masyarakat umum.[[49]](#footnote-49)

Pada dekade yang sama, Malaysia terkena dampak resesi ekonomi dunia akibat krisis minyak dan merosotnya harga kebutuhan barang-barang primer. Pertumbuhan manufaktur yang dijadikan andalan program NEP (new economy policy) mulai mengalami penurunan sehingga banyak industri di Malaysia menghentikan produksinya dan menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Keadaan ini menyebabkan penduduk Malaysia dan para TKI, khsususnya TKI ilegal, kemudian saling berkompetisi secara langsung. Masalah TKI mulai muncul ke permukaan dan menimbulkan dampak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Malaysia.

Beberapa kelompok masyarakat malaysia kemudian turut memberi komentar atas kehadiran TKI tersebut. Salah satu komentar dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Democratic Action Party (DAP), lim kit siap, didukung oleh petinggi partai MCA (Malayan Chinesse Association) yang mempersoalkan besarnya kehadiran TKI dikaitkan dengan masalah pertimbangan ras di Malaysia.[[50]](#footnote-50) Keluhan juga datang dari pihak National Union Of Plantation Worker (NUPW) dan Malaysia Trade Union Congress (MTUC). Kesediaan TKI untuk menerima upah yang lebih rendah ternyata kemudian mengganggu posisi tawar kelompok tersebut. Memasuki dekade 90-an, komentar tentang TKI datang dari elit-elit pemerintahan Malaysia, seperti yang disampaikan oleh perdana menteri Mahatir Muhammad, yang mengingatkan bahwa ketergantungan yang tinggi akan pekerja asing akan menimbulkan masalah serius di bidang sosial dan kesehatan.

Masalah yang ditimbulkan oleh TKI, khususnya yang termasuk kategori undocumented ini membuat pemerintah malaysia melakukan serangkaian langkah-langkah penganggulangan, baik yang bersifat kooperatif maupun koersif. Langkah kooperatif dilakukan pada tahun 1984, dengan ditandatanganinya medan agreement antara pemerintah republik indonesia, yang diwakili oleh menteri tenaga kerja. Sudomo, dengan wakil perdana menteri / menteri dalam negeri malaysia, datuk musa hitam. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa penambahan tenaga kerja indonesia oleh calon pemberi pekerjaan di Malaysia harus dibuat melalui jalur resmi, yaitu melalu menteri dalam negeri, menteri tenaga kerja dan departemen imigrasi malaysia, serta menteri tenaga kerja Indonesia. Bentuk kooperatif yang lain adalah dengan upaya pemutihan (legalisasi) bagi para TKI pada tahun 1989 dan 1991.

Namun demikian, mekanisme resmi yang ditawarkan dalam medan agreement tersebut kurang mendapat respon positif, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja sendiri. Banyaknya birokrasi yang harus dijalani menyebabkan proses tersebut berjalan lambat dan memakan biaya yang tidak sedikit.

Kegagalan medan agreement kemudian ditindaklanjuti oleh usaha legalisasi atau pemutihan yang dilakukan terhadap TKI undocumented yang bekerja di sektor perkebunan. Usaha ini pun tidak membawa hasil yang memuaskan, karena sejak program legalisasi ini diterapkan tahun 1989 sampai memasuki 1991, hanya sejumlah 19.984 TKI ilegal yang berhasil dilegalisasi, dari keseluruhan jumlah sekitar 500.000 orang.[[51]](#footnote-51) Melihat hasil yang kurang memuaskan ini. Pemerintah Malaysia kembali melakukan proses legalisasi, namun dengan prosedur yang lebih ringan, berupa pemberian amnesty. Secara teknis, para pengusaha Malaysia yang memperkerjakan TKI undocumented diperintahkan untuk mendafatarkan para pekerjanya tersebut ke Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Berbeda dengan tindakan-tindakan sebelumnya, proses legalisasi ini kemudian diikuti oleh usaha koersif berupa dilancarkannya ops nyah I (get rid operation 1) yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan legalisasi tahap kedua tersebut, dengan memulangkan para TKI ilegal yang tidak juga menjalankan proses legalisasi, sekaligus menghentikan masuknya arus pekerja undocumented.

Ops nyah I dilaksanakan pada awal bulan januari 1992 dengan menitikberatkan pada garis pantai selat malaka dan perbatasan daerah utara. Sedangkan ops nyah II dilaksanakan pada bulan juli 1992 dengan berfokus pada seluruh daratan malaysia. Para TKI ilegal yang tertangkap kemudian dideportasi. Tidak kurang dari enam battalion poisi khusus dikerahkan dalam operasi ini, disertai dengan pembangunan beberapa kamp penampungan bagi mereka yang tertangkap. Memasuki tahun 1998, malaysia kembali melaksanakan ops nyah III. Dibandingkan dengan dua operasi terdahulu, ops nyah III melibatkan lebih banyak aparat, oleh karena itu operasi tersebut dinamakan ops nyah bersepadu (integrated get rid operation). Unsur-unsur yang terlibat antara lain dari kepolisian, angkatan laut, bea cukai, imigrasi, angkatan darat, dan angkatan udara. Sasaran operasi meliputi darat, laut, dan udara dengan penjagaan ketat di perairan selat malaka, perbatasan Malaysia-Indonesia di pulau Sumatera dan Kalimantan, serta bandar udara, bahkan di beberapa stasiun kereta api sering dijumpai polisi bersenjata senapan M-16. Operasi ini juga bertujuan untuk mengadakan pembersihan di kalangan aparat Malaysia yang terlibat sindikat TKI ilegal.

Pada tahun 2000 terjadi kerusuhan di cyberjaya yang disebabkan oleh beberapa TKI dan disinyalir terkaiT dengan Gerakan Aceh Merdeka. Sejak itu, hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia senantiasa mengalami pasang surut. Kabar paling akhir dari Kualalumpur, pemerintah Malaysia kembali akan memulangkan TKI undocumented. Namun setelah pemerintah Indonesia mengadakan konsultasi, pemulangan tersebut ditunda sampai berakhirnya pemilu presiden putaran kedua pada bulan sptember 2004, tepatnya pada bulan januari 2005, walaupun sebagian kecil dari mereka berangsur-angsur dipulangkan waktu.

1. Kebijakan Indonesia dalam Bidang Ketenagakerjaan

Dalam ketenagakerjaan, Indonesia selalu dihadapkan dengan masalah-masalah yang sama dari tahun ke tahun. Masalah-masalah ketenagakerjaan itu adalah menginkatnya jumlah pengangguran, menumpuknya tenaga kerja di sektor pertanian dan informal serta beragamnya masalah TKI di luar negeri.

Pada tahun 1990, Indonesia memiliki populasi sebesar 185 juta jiwa. Jumlah ini sebenarnya ridak jauh berbeda dengan negara berkembang lainnya. Walaupun dalam 10 tahun terakhir ini terjadi penurunan tetapi jumlahnya masih relatif besar dan memiliki rasio ketergantungan yang cukup tinggi. Tingginya populasi penduduk Indonesia ternyata berbanding terbalik dengan kesempatan kerja yang tersedia di Indonesia. Kondisi ini sedikit banyak berdampak pada kondisi perekonomian makro Indonesia. Jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian makro Malaysia, Indonesia cukup tertinggal. Perbandingan kondisi ekonomi makro kedua negara ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Malaysia dan Indonesia:

Ekonomi makro dan situasi demografi periode 1990-an.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator | Malaysia | Indonesia |
| Tingkat pertumbuhan penduduk pertahun (1985-1990) | 2.6 | 1.9 |
| Tingkat pertumbuhan GDP 1991 | 8.6 | 6.8 |
| Jumlah tenaga kerja 1990 (dalam ribuan) | 7.05 | 72.0 |
| GNP per kapita 1990 (US$) | 2.340 | 560 |
| Presentase tenaga kerja di sektor pertanian 1990 | 27.8 | 49.8 |
| Presentase tenaga kerja di sektor manufaktur, pertambangan, dan konstruksi | 26.5 | 12.4 |
| Presentase tenaga kerja di sektor jasa | 45.7 | 38.5 |
| Tingkat partisipasi pria | 85.7 | 71.2 |
| Tingkat partisipasi wanita | 47.3 | 39.2 |

Sumber : graeme hugo, indonesian labour migration to malay : trends and policy consideration, south east asian journal of social science vol npo 1, 1993.

Jika melihat perbandingan kondisi makro ekonomi Indonesia-Malaysia pada tabel 1, terlihat bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk 2 kali lipat dari populasi penduduk Malaysia. Tetapi tingginya populasi ini tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan GDP. Akhirnya pendapatan penduduk indonesia pun relatif rendah dan TKI pun berlim[ah tanpa diimbangi kesempatan kerja yang luas. Sedangkan di malaysia yang terjadi adalah sebaliknya. Pendapatan perkapita penduduk relatif tinggi tetapi tenaga kerja yang tersedia terbatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi dalam negeri masing-masing negara dalam bidang ekonomi membuat kedua negara tersebut menjalin kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi supply dan demand tenaga kerja dalam rangka menjalankan roda perekonomian masing-masing negara. Indonesia memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terus menerus . pada tahun 1989, penduduk Indonesia berjumlah 147.49 juta jiwa. Pada tahun 1990, jumlah ini meningkat menjadi 179.38 juta jiwa. Sepuluh tahun berikutnya (2000) jumlah Indonesia diproyeksikan berjumlah 210.439 juta jiwa. Jumlah ini diprediksikan akan meningkat pada tahun 2010 menjadi sekitar 235 juta jiwa.[[52]](#footnote-52)

Dampak jumlah penduduk yang besar ditambah dengan distribusi pendapatan yang tidak merata akan berpengaruh pada pertumbuhan angkatan kerja dan peluang mendapatkan kesempatan kerja. Berdasarkan survey angkatan kerja nasional (sakernas) samapai bulan agustus 2002 menunjukkan jumlah angkatan kerja indonesia mencapai 100.8 juta orang atau naik 1.03 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan komposisi 63.3 juta orang (62.8%) laki-laki dan 3.5 juta orang (37.2%) perempuan.[[53]](#footnote-53)

Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut sekitar 58.7 juta orang (58.2%) berada di pedesaan dan 42.1 juta orang (41.8%) berada di perkotaan. Sedangkan angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka berjumlah 9.1 juta orang (9.1%) naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8 juta orang (8.1%). Sejumlah 4.1 Juta orang (44.8%) pengangguran terbuka berada di pedesaan dan 5 juta orang (55.2%) berada di perkotaan.[[54]](#footnote-54) Dengan pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun 2002 yakni sekitar 3.7% tingkat penyerapan angkatan kerja hanya mencapai sekitar 0.8 juta orang (dibandingkan dengan peningkatan tenaga kerja pada tahun 2002 yang sebesar 1.9 juta orang) atau penciptaan lapangan kerja hanya mencapai sekitar 200 ribu orang tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi.

Badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) memperkirakan dalam lima tahun ke depan gambaran soal angla pengangguran di indonesia masih akan suram karena tersedianya lapangan kerja. Tahun 2004 angkatan kerja akan mencapai 102.888 juta orang termasuk angkatan kerja baru 2.10 juta orang. Tambahan lapangan kerja yang tak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru itu menyebabkan angka pengangguran terbuka tahun 2004 meningkat menjadi 10.38 juta orang (10.32% dari angkatan kerja) dari tahun sebelumnya 10.13 juta orang (9.85 % dari angkatan kerja). Peningkatan angka pengangguran terbuka ini diperkirakan masih akan berlanjut sampai tahun 2005, dimana angkanya diproyeksikan menjadi 11.19 juta orang atau 10.45% dari angkatan kerja. Proyeksi ini dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2004 dan 2005 masing-masing 4.49% dan 5.03%. dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.03% pada tahun 2005, lapangan kerja yang tercipta hanya 1.75 juta orang. Proyeksi tersebut dapat dilihat jelas dalam tabel dibawah ini:

Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di indonesia pada tahun 1996-2005

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Pertumbuhan ekonomi (%) | Pertumbuhan lapangan kerja (juta orang) | Angkatan kerja baru (juta orang) | Pengangguran terbuka |
| Juta orang | % |
| 1996 | 7.82 | 3.79 | 3.96 | 4.29 | 4.86 |
| 1999 | 0.79 | 1.14 | 2.11 | 6.03 | 6.26 |
| 2000 | 4.92 | 1.00 | 0.94 | 5.81 | 6.07 |
| 2001 | 3.44 | 0.97 | 3.16 | 8.00 | 8.10 |
| 2002 | 3.66 | 0.84 | 1.97 | 9.13 | 9.06 |
| 2003 | 3.99 | 1.10 | 2.10 | 10.13 | 9.85 |
| 2004 | 4.49 | 1.40 | 2.10 | 10.83 | 10.32 |
| 2005 | 5.03 | 1.75 | 2.07 | 11.19 | 10.45 |

Sumber : Sugeng Budiharsono, kondisi dan penyebab kemiskinan multidimensi di Indonesia. Jurnal analisis sosial, politikm dan hukum perburuhan, vol. 2 no 1, mei 2004.

Upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui pertumbuhan sekonomi belum mampu mengurangi julah pengangguran. Selain karena pertumbuhan ekonomi relatif rendah, kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan pekerjaan relatif kecil dan cenderung menurun. Penurunan penciptaan lapangan kerja terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998.

Salah satu kejadian yang memberatkan pemberi kerja untuk menggunakan lebih banyak tenaga kerja adalah penetapan upah minimum yang meningkat secara cepat. Secara nasional, pada tahun 2000 dan 2001 rata-rata peningkatan upah minimum adalah sekitar 30% per tahun. Dibeberapa provinsi peningkatan yang diusulkan untuk tahun 2002 sama tingginya atau bahkan lebih tinggi (38% di DKI Jakarta).

Pada tahun 2002, upah minimum secara riil untuk pekerja di sektor industri sekitar 34 % lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis sedangkan pendapatan perkapita riil masyarakat belum pulih.[[55]](#footnote-55) Peningkatan upah minimum tersebut berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Sekalipun tidak selalu terbukti, para pakar ekonomi sudah lama berpendapat bahwa di lingkungan pasar yang kompetitif peningkatan upah minimum menyebabkan banyak orang akan kehilangan pekerjaannya.

Tingginya tingkat pengangguran juga didorong oleh kebijakan yang mengakibatkan pergeseran usaha padat karta ke usaha padat modal. Kebijakan ini adalah ketentuan putus hubungan kerja (PHK) dan pemberian pesangon. Ketentuan tentang PHK dan pemberian kerja dan pekerja mengakibatkan perusahaan cenderung enggan untuk mempekerjakan pekerja yang baru dan cenderung untuk memilih menggunakan mesin sebgai pengganti dari tenaga kerja.

Menurunnya kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan pekerjaan juga disebabkan oleh iklim investasi yang belum pulih, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apabila terjadi peningkatan investasi. Dengan keterkaitannya ini, upaya untuk mengatasi masalah pengangguran harus dilakukan dengan kebijakan yang terpadu, yang diarahkan pada penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif termasuk kebijakan dalam mengatur ketenagakerjaan yang tidak terlalu memberatkan para penanam modal.

Masalah lain dalam ketenagakerjaan adalah meningkatnya pengangguran usia muda (15-19 tahun) dan banyaknya pekerja di sektor informal yang kurang produktif. Pada tahun 2001 pengangguran pekerja di daerah pedesaan sebanyak 3.3 juta orang, pada tahun 2002 pekerja formal berkurang sebanyak kurang lebih 1.5 juta orang. Dari 1.5 juta orang tersebut sepertiganya merupakan pekerja yang bekerja di sektor formal di perkotaan sehingga jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian meningkat pesat. Jumlahnya mencapai 50 % dari angkatan kerja. Situasi ini disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaandi sektor industri. Akibat yang dikhawatirkan dari peningkatan jumlah ini adalah rendahnya pendapatan danakan bertambahnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran adalah dengan melakukan pengiriman TKI ke luar negeri. Dengan mengirimkan TKI ke luar negeri, indonesia akan mendapatkan devisa dan juga mengurangi pengangguran, tetapi dalam pelaksanaannya, ternyata pengiriman TKI ini pun menimbulkan masalah. Inti dari permasalahan yang menimpa Tki kurang berfungsinya sistem perlindungan TKI dan sosialisasi sistem tersebut kepada TKI. Oleh karena itu pemerintah perlu membangun jaringan pengamanan bagi TKI di luar negeri dengan meingkatkan jaminan keselamatan dan keamanan TKI yang akan bekerja di luar negeri.

1. Kebijakan Industrialisasi Malaysia : *New Economy Policy.*

Dasar ekonomi baru atau New Economy Policy merupakan salah satu rancangan landasan pembangunan yangdibuat oleh pemerintah Malaysia. Kebijakan ini merupakan respon terhadap situasi dalam negeri Malaysia. Pada tahun 1969, Malaysia mengalami ketidakstabilan dalam bidang sosial dan ekonomi. Situasi ini mengantarkan Malaysia pada masalah kemiskinan, pengangguran dan ketidakseimbangan ekonomi inter-etnik. NEP mulai diberlakukan sejak tahun 1970. Sasaran utama diberlakukannya adalah untuk mencapai kesatuan nasional dengan cara memberantas kemiskinan, mengabaikan perbedaan ras, dan mengatur kembali masyarakat untuk mencapai keseimbangan ekonomi inter-etnik yang pada saat itu tempat dikuasai oleh etnik melayu pribumi dan china pribumi.[[56]](#footnote-56)

Langkah nyata selanjutnya yang dilakukan oleh Malaysia untuk mengimplementasikan NEP adalah dengan membuat outline prospective plan (OPP) untuk jangka waktu hingga tahun 1990, tujuannya adalah untuk menghilangkan perbedaan atau disparatis perekonomian antar etnik (melayu, bumi putera, dan china) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya sasaran NEP adalah meningkatkan intervensi negara dalam sektor publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan orientasi ekspor dan industrialisasi.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Malaysia dalam program NEP untuk pembangunan industri adalah mempercepat outward oriented dalam industrialisasi yang berfokus pada ekspansi tingkat ekspor dalam skala besar, mengembangkan sumber daya yang berbasis industri untuk peningkatan ekspor, meningkatkan sumber daya yang tidak berbasis industri seperti sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekspor, mempromosikan strategi industri berat, membuat penyesuaian dalam sektor industri, modernisasi dan rasionalisasi serta mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia dan menetapkan pertimbangan infrastruktur untuk rencana lokasi industri baru.

Pada tahun 1999, sektor perkebunan di semenanjung Malaysia mengalami kekurangan tenaga kerja sebanyak 364.324 orang. Dari jumlah sebanyak 141.641 orang diperlukan di perkebunan karet, 197.990 orang di perkebunan sawit, 11.000 orang bagi tanaman kelapa, 11.976 orang bagi kakao dan 1.719 bagi jenis tanaman lain. Berdasarkan negara bagian, kekurangan tenaga kerja paling serius berlaku di johor sebanyak 105.423 orang, perak sebanyak 59.547 orang, selangor sebanyak 58.725 orang dan negeri sembilan sebanyak 58.205 orang. Keadaan ini mencerminkan kondisi keadaan tenaga kerja di malaysia.[[57]](#footnote-57)

Menurut departemen tenaga kerja Malaysia, dari 80 ribu orang pencari kerja yang mendaftarkan diri pada tahun 2003 , tidak ada seorang pun yang berminta bekerja di sektor perkebunan. Hal ini disebabkan karena upah buruh di malaysia lebih murah dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lain, misalnya sektor industri. Menurut riset rancangan malaysia, sebanyak 54.9% dari mereka yang bekerja di sektor pertanian berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 1993 dan di sektor perkebunan merupakan paling miskin. Ini menyebabkan ketakutan kelompok usia muda untuk melibatkan diri dalam sektor tersebut karena dirasakan tidak mempunyai masa depan yang baik. Terlebih lagi golongan muda di malaysia pada saat ini mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mereka cenderung untuk memilih bekerja di sektor industri dan jasa dibandingkan di perkebunan.[[58]](#footnote-58)

Bahkan sektor kontruksi di Malaysia membutuhkan 100 ribu tenaga kerja asing (TKA) dan ribuan orang lainnya terutama di sektor perkebunan yang tidak diminati oleh tenaga kerja lokal karena menganggap pekerjaan tersebut bersifat kasar dan tidak sesuai dengan mereka. Penawaran ini tentunya memberikan peluang bagi pekerja dari negara lain termasuk indonesia untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Saat ini perusahaan yang ada di Malaysia barat membutuhkan tenaga kerja sebanyak 29 ribu orang. Jenis pekerjaan yang dibutuhkan mayoritas adalah sebagai tenaga bangunan, tenaga untuk perhotelan, perkebunan, dan restoran.

Sejak diberlakukannya NEP, Malaysia mengalami kemajuan pesat, diantara enam negara anggota asean pada waktu itu. Malaysia merupakan negara yang mampu mengikuti jejak Singapura. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa GNP Malaysia untuk tahun 1985 adalah US $ 860 dan terus meningkat pesat pada tahun- tahun berikutnya sebanyak 7.3 % pertahun.

Selain menerapkan kebijakan ekonomi, pembangunan ekonomi Malaysia juga didukung oleh tersedianya tenaga kerja yang ahli dan terdidik, sebagai dampak dari kebijakan pendidikan dasar yang wajib dan gratis, serta dukungan kepada pendidikan tinggi. Pemerintah Malaysia memberikan ratusan ribu beasiswa kepada kaum melayu untuk melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi, bagi yang mampu secara akademis. Puluhan ribu beasiswa juga diberikan bagi kaum melayu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri.

Sejak awal tahun 1990-an, “visi 2020” Mahathir Muhammad telah menjadi landasan pembangunan Malaysia. Visi 2020 Malaysia, menargetkan peningkatan GNP delapan kali lipat dan pencapaian status negara maju pada tahun 2020. Kebijakan ini menetapkan swastanisasi sebagai kunci dari pembangunan ekonomi nasional, peran investasi asing untuk mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, serta pembangunan bangsa secara menyeluruh dari aspek ekonomi, politik, sosial, spiritual, psikologi, dan budaya.

Pertengahan tahun 2001, PM Mahatir Muhammad memperkenalkan rencana baru untuk membangun ekonomi, *Nation Vision Policy* yaitu pembangunan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergeseran kearah ilmu pengetahuan (K-Economy) merupakan bagian dari rencana yang lebih komprehensif untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020.

1. <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_217743.pdf>. Diakses pada tanggal 2 februari 2016. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm> Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 4 februari 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_421136/lang--en/index.htm>, diakses 5 februari 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. [http://www.mida.gov.my/home/developed-infrastructure/posts/?lg=MAL#](http://www.mida.gov.my/home/developed-infrastructure/posts/?lg=MAL), diakses 5 februari 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. “RI Awaits Clarification from malaysia: Nuwawea, The jakarta Post, 4 februari 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mardzoeki, Faiza (Solidaritas Perempuan), Malaysia And Indonesia Both Exploit Workers, Dalam The Jakarta Post, 14 September 2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ade Priangani & Sigit Harimurti, *Dinamika Politik Luar Negeri Pasca Orde Baru*, (Bandung:Centre For Political And Local Autonomy Studies C, 2004), Hlm. 105. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Nizam, Warga Asing : Rebut Peluang Pengampunan, diakses melalui [www.utusan.com.my](http://www.utusan.com.my). Diakses 2 februari 2016. [↑](#footnote-ref-8)
9. KJ. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Drs. Wawan Djuanda) (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya,1987) hal 26-27. [↑](#footnote-ref-9)
10. Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins, *Methodology in TheStudy of Internasional Relational.*(Hall Inc Englewood Cliffs NI USA 1986), hal 14. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rudi T May,Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global (Bandung:Aditma,2003),hml.2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Terjemahan Wawan Juanda).(Bandung : Putra Bardin, 1990), Hal.7. [↑](#footnote-ref-12)
13. KJ. Holsti, *Politik Internasional* :*Suatu Kerangka Analisis*(Terjemahan Drs Wawan Djuanda) (Bandung : Pedoman Ilmu Jaya,1987) hal 650. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mochtarc Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994), hml 140 [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar,* (Jakarta :CV. Rajawali, 1990),hlm.61 [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://ditpolkom.bappenas.go.id> diakses 22 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional,* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma JayaYogyakarta, 1998), hal. 42 [↑](#footnote-ref-17)
18. R. Soeprapto*, Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi, Dan Perilaku* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal 144. [↑](#footnote-ref-18)
19. AA. Banyu Perwita Dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 145. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jack. C Plano Dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Terjemahan Drs. Wawan Djuanda)(Bandung: Putra A Bardin, 1999), hal 5. [↑](#footnote-ref-20)
21. Mochtarc Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994), hml 184 [↑](#footnote-ref-21)
22. Jack. C Plano Dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Terjemahan Drs. Wawan Djuanda)(Bandung: Putra A Bardin, 1999), hal 201. [↑](#footnote-ref-22)
23. SL. Roy, *Diplomasi* (Jakarta: CV Rajawali, 1991) hal 2. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid, hal 2. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid, hal 2. [↑](#footnote-ref-25)
26. SL. Roy, *Diplomas*i, (jakarta: cv rajawali, 1991), hal 3. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid, hal 5. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, hal 10. [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://www.fidh.org/IMG/pdf/MalaisieCONJ489eng.pdf>, diakses 3 maret 2016. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pedomana Rekrut CTKI Dalam Pelaksanaan Antar Kerja Di Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, 2005, hal 3. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pedoman Dan Materi Sosialisasi Program Penempatan Tki Ke Luar Negeri, Depnaketrans: Direktoral Jenderal Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri, 2001, hlm 24. [↑](#footnote-ref-31)
32. James N Rosenau & Thomsaon Kenneth W, *World Politic:An Introduction,* 197, New York: The Free Press, Hlm 15. [↑](#footnote-ref-32)
33. Howard H Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative And Conceptual Approach.* 1974, Colombus: Charles E Merril Publishing Company, Hlm 5. [↑](#footnote-ref-33)
34. KJ. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Des Wawan Djuanda)(Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1987)Hal 26. [↑](#footnote-ref-34)
35. Howard H Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative And Conceptual Approach.* 1974, Colombus: Charles E Merril Publishing Company, Hlm 3. [↑](#footnote-ref-35)
36. KJ. Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Des Wawan Djuanda)(Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1987)Hal 17. [↑](#footnote-ref-36)
37. Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional*: Disiplin Dan Metodologi (Jakarta:LP3ES, 1994), Hal 41. [↑](#footnote-ref-37)
38. KJ. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Des Wawan Djuanda)(Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1987)Hal 92. [↑](#footnote-ref-38)
39. Jack C. Plano dan Roy Olton Kamus Hubungan Internasional (Terjemahan Drs. Wawan Djuanda)(Bandung: Putra A Bardin, 1999),Hal 7. [↑](#footnote-ref-39)
40. KJ. Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Des Wawan Djuanda)(Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1987)Hal 182. [↑](#footnote-ref-40)
41. Penempatan TKI ke luar negeri merupakan program nasional yang dilandasi oleh komitmen nasional sejalan dengan amanat GBHN 1993 (TAP MPR No11/PR/1993). [↑](#footnote-ref-41)
42. Masri Hayat, SH, Bimbingan Teknis Penempatan TKI ke Malaysia:Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia Tentang Penempatan TKI Sektor Formal dan Informal ke Malaysia, APJATI, DEPNAKER RI, dan KBRI [↑](#footnote-ref-42)
43. Laporan tahunan KBRI kualalumpur 1997-1998, hal 332. [↑](#footnote-ref-43)
44. Laporan Tahunan KBRI Kualalumpur 1999-2000, Hal 103. [↑](#footnote-ref-44)
45. Firdaus Haji Abdullah, The Rumpun Concept In Malaysia-Indonesia Relations”, dalam Indonesian Quartely, Vol XXI, No 2, Second Quarter 1993. [↑](#footnote-ref-45)
46. Azizah Kassim,”International Migration and its impact on Malaysia” dalam Confidence Building and Conflict Reduction, 11th ASPAC Roundtable, ASEAN-ISIS, 5-8 June 1997, Kualalumpur, Malaysia. [↑](#footnote-ref-46)
47. Alba Basnoer, “Masalah Tenaga Kerja Gelap Indonesia Di Malaysia”, Pelita, 26 November 1990. [↑](#footnote-ref-47)
48. Azizah Kassim, “The Unwecomed Guests: Indonesian Immigrants and Malaysian Public Responses”, dalam Southeast Asian Studies, vol 25, no 2, september 1987. [↑](#footnote-ref-48)
49. Firdaus haji abdullah,”The Phenomenon Of Ilegal Immigrants”, dalam The Indonesian Wuartely , Vol XXI, No 2, tahun 1993 hal 174-175. [↑](#footnote-ref-49)
50. Azizah kassim,, “the unwelcomed guest”, op.cit.,hal 277. [↑](#footnote-ref-50)
51. Azizah Kassim, “International Migration and Alien Labour Employment: The Malaysian Experience, dalam Communication, Labour and Megacities, Ed By Toh Thian Ser, Iseas, Singapore, 1998, hal 77. [↑](#footnote-ref-51)
52. www.depkes.go.id [↑](#footnote-ref-52)
53. Bappenas, Perekonomian Indonesia Tahun 2004: Prospek Dan Kebijakan, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Jakarta, 2003, Hlm IV-15. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ibid, Hlm IV-16 [↑](#footnote-ref-54)
55. Chris Manning, “Upah Minimum : Kebijakan Sosial Versus Kebijakan Ekonomi?”, <http://www.smeru.or.id/2002/ed01/200201message.htm>. Diakses 4 maret 2016. [↑](#footnote-ref-55)
56. Edmund Terence Gomez dan Jomo K. S, Malaysia’s Political Economy : Politics, Patronage, and Profit, Cambrige University Press, UK, 1997, hal. 24 [↑](#footnote-ref-56)
57. Laporan Tahunan KBRI Kualalumpur 1999, hal 39. [↑](#footnote-ref-57)
58. Pandriono*, Liku-Liku Perjalanan TKI/TKW Tak Berdokumen Ke Malaysia : Suatu Hasil Penelitian Observasi Partisipasi,* Gema Press, 1999, Malang, hlm 63. [↑](#footnote-ref-58)